

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

DPRD Minta Formula E Tahun Depan Dibatalkan

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, tidak setuju Formula E dilanjutkan. Perhelatan sebelumnya banyak tidak jelas, termasuk pengeluaran *commitment fee* 560 miliar dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Batalkan saja! *Toh*, tidak ada manfaatnya buat warga DKI. Apalagi prioritas kegiatan Pemprov DKI adalah penanggulangan banjir, kemacetan, serta antisipasi resesi 2023," kata August saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (10/11).

Formula E sama sekali bukan prioritas, tapi menjadi beban belanja DKI Jakarta. Walaupun penyelenggaraan diserahkan ke Jakpro dan Ancol (B to B) sebagai BUMD DKI Jakarta, DKI mestinya lebih fokus kepada kegiatan yang bisa mengantisipasi dampak resesi tadi. August menambahkan, sebaiknya anggaran Formula E sebaik dipakai Pemprov untuk menyejahterakan warga Jakarta. "Dana yang dialokasikan ke Formula E sebaiknya dipakai Pemprov DKI untuk menyejahterakan warga," ucap August.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, minta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) lebih dulu memberikan laporan pertanggungjawaban Formula E kemarin, sebelum Pj Guber-

nur melanjutkannya tahun depan. Gembong ingin melihat laporan pertanggungjawaban kegiatan Formula E sebelumnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menuturkan Jakpro diminta membuka audit keuangan gelaran Formula E 4 Juni 2022 lalu. Karena hingga Anies Baswedan lengser, ajang balap mobil listrik tersebut tidak bisa diaudit. "Alasan yang dikemukakan tidak ada Kantor Akuntan publik yang mau. Artinya, besaran kerugian pelaksanaan Formula E 2022 tanpa data," kata Gilbert.

Menurut Gilbert, Jakarta E-Prix yang digelar tahun depan tidak akan bijaksana karena laporan keuangannya tidak jelas. "Rencana balapan untuk 2023 menjadi tidak bijaksana karena pelaksanaan tidak dibuka ke publik. Kalau untung, tentunya masuk akal dilangsungkan lagi," ungkap Gilbert.

Gilbert terus mendesak Jakpro segera membuka audit Formula E ke publik, sehingga masyarakat tahu untung atau rugi. "Tetapi, apakah karena *commitment fee* sudah telanjur dibayar, sehingga secara hukum harus dilaksanakan walaupun rugi, tidak jelas. Kalau itu yang menjadi alasan, sebaiknya dibuka ke publik," ucap Gilbert.

Penting untuk disadari, te-

gas dia, perhelatan Formula E ini menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan Pemprov DKI era Gubernur Anies. "*Good corporate governance* ada di titik terendah, dan tanpa pertanggungjawaban. Perilaku seperti ini sebaiknya tidak dilanjutkan manajemen Jakpro dan Pemprov," pungkas Gilbert.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memberi lampu hijau terkait kelanjutan pelaksanaan ajang balap mobil listrik, Formula E selama 2023-2024. "Itu *kan* sudah *business to business*. Silakan saja kalau Jakpro dengan Ancol mau melaksanakan, tidak apa-apa juga. Silakan," kata Heru. ■ **jon/G-1**